

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Kebutuhan dan manfaat akuntansi di era modern ini tidak diragukan lagi bahwa setiap perusahaan yang bergerak dibidang apapun pasti membutuhkan jasa orang yang bisa mengaplikasikan ilmu akuntansi ke dalam aktivitas sesuai bidangnya. Seperti halnya rumah sakit yang mayoritas bekerja sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memberikan dan memastikan masyarakat Indonesia menerima pelayanan kesehatan sejak dini. Maka dari itu sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sendiri dibentuk sebagai penyelenggara program jaminan kesehatan salah satunya adalah program kesehatan masyarakat, undang-undang tersebut mengatur kerjasama antara pihak Rumah sakit dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dengan bekerjasamanya rumah sakit, akuntansi juga menyediakan ilmu yang mengkategorikan ke dalam akuntansi sektor publik.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan satu-satunya program pemerintah yang menyelenggarakan kesehatan masyarakat Indonesia, dan juga merupakan Badan Usaha Milik Negara yang memang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengatasi keluhan-keluhan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Fasilitas dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang disediakan ialah fasilitas yang ada di rumah sakit itu sendiri, tentunya rumah sakit yang telah melakukan kerja sama, pembayaran transaksi biaya kesehatan dapat dilakukan dengan menunjukkan kartu peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

sebagaimana telah di atur dalam Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Depkes RI) 2008 program jaminan pemeliharaan kesehatan semua akan dialihkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang di selenggarakan sejak tanggal 1 Januari 2014 maka dari itu pelayanan kesehatan benar-benar diharapkan maksimal dalam melayani pesertanya. Pencatatan keuangan harus jelas dan dicatat pada laporan keuangan oleh kedua belah pihak pada transaksi tersebut harus disertai bukti tercetak, Hermawan dalam (Meilani T. & Pusung, 2014). Bukti ialah salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan bahwa transaksi telah dilakukan. Tahap pencatatan transaksi dapat dilakukan sejak awal pasien atau peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan itu datang dengan mencatat nama dan nomor kepesertaan yang tertera di kartu peserta, data pasien atau peserta dijadikan informasi pada laporan keuangan.

Organisasi nirlaba adalah organisasi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan profit atau suatu organisasi yang tidak berlandaskan komersil. Karakteristik organisasi nirlaba salah satunya menerima kontribusi sumber dana dari pemberi dana yang tidak mengharapkan pengembalian, pengoperasiannya untuk menghasilkan barang dan jasa bukan untuk mencari laba, pemberi dana tidak terlibat kepentingan terhadap organisasi. Organisasi non laba menyiapkan satu set laporan keuangan yang memuat posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Pada dasarnya laporan keuangan adalah alat komunikasi yang bisa digunakan sebagai transaksi dan informasi, lebih lagi laporan keuangan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti halnya pemangku kepentingan, investor. Dalam mencatat laporan keuangan pada hakikatnya, informasi tercatat dari

kejadian atau aktivitas aktiva dan tidak mencatat transaksi yang tidak terjadi. Husnia alam (Repi, Mogi-Nangoi, & Wokas, 2015) mengatakan bahwa perlunya pertanggungjawaban keuangan dari organisasi nirlaba untuk menilai kinerjanya. Laporan keuangan merupakan hal yang dibutuhkan untuk penekanan besar ditujukan pada organisasi yang menghendaki keterbukaan, akuntabilitas, ketidakberpihakan dan kredibilitas guna untuk konsumsi organisasi lainnya yang mempunyai kepentingan. Ketika organisasi melakukan pencatatan transaksi dengan benar dan melaporkan sesuai waktu yang ditentukan maka organisasi tersebut mendapatkan informasi yang bermutu, karena kesesuaian memberi efek positif bagi organisasi dan menjadikannya organisasi yang bermutu. Menurut (Samryn, 2016:4) sistem informasi akuntansi bisa dirancang secara spesifik untuk penyesuaian tipe organisasi baik organisasi komersil maupun organisasi non komersil.

PSAK No. 45 tentang laporan keuangan nirlaba, dilihat dari arti kata nirlaba yaitu organisasi yang pada dasarnya tidak mengharapkan profit, organisasi nirlaba notabennya perusahaan non profit. Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis, perbedaannya bisa kita lihat pada aktivitasnya memperoleh sumber daya untuk kemudian dilakukan berbagai aktivitas operasionalnya sedangkan organisasi nirlaba memperoleh dana untuk aktivitasnya dari sumbangan para anggota maupun penyumbang lainnya yang tidak mengharapkan imbalan dari organisasi tersebut. Seperti rumah sakit yang bergerak pada bidang nirlaba menangani pasien atau peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, rumah sakit dituntut mematuhi peraturan yang telah

mengikatnya agar meningkatkan pelayanan bagi peserta dengan memperdayakan sumber daya manusia secara efektif.

Penerapan akuntansi di rumah sakit yang masih belum bisa dikatakan sesuai, alat manajemen yang sering digunakan sebagai Informasi oleh pihak internal seperti manajer atau direktur rumah sakit untuk mengambil keputusan dan mengawasi kegiatan rumah sakit sebagai bahan evaluasi kedepannya. Kesalahan internal yang terjadi biasanya menyangkut pelayanan dan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Laporan keuangan sering kali menjadi kendala karena masih sulit dipahami dan mempunyai nilai banding laporan keuangan yang rendah, selain itu masih terdapat kesalahan dalam penginputan data pada program yang sudah disediakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Hanya beberapa personil saja yang menguasai cara kerja sistem, bukan hanya itu pihak rumah sakit terkadang dirugikan dengan dana yang harus diganti akibat dari kesalahan sumber daya manusianya. Dari uraian diatas, peneliti mengangkat judul **“Penyajian Dana BPJS Dalam Laporan Keuangan Rumah Sakit Wijaya Kusuma Lumajang Tinjauan PSAK No. 45 ( Studi Kasus pada Rumah Sakit Wijaya Kusum Lumajang) ”**.

## **1.2 Batasan Masalah**

Identifikasi masalah dengan maksud agar terhindari pembahasan yang terlalu luas, dalam penelitian kali ini difokuskan pada penyajian dan pencatatan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam laporan keuangan Rumah Sakit Wijaya Kusuma sesuai dengan PSAK No. 45.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan identifikasi permasalahan yang ada, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyajian dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam laporan keuangan Rumah Sakit Wijaya Kusuma Lumajang, Tinjauan PSAK No. 45?
2. Bagaimana penyajian laporan keuangan di RS. Wijaya Kusuma Lumajang, Tinjauan PSAK No. 45 ?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyajian dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam laporan keuangan Rumah Sakit Wijaya Kusuma Lumajang.
2. Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan RS. Wijaya Kusuma Lumajang.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan hasil dari penelitian ini bermanfaat dalam aspek teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian bisa bermanfaat yang berkelanjutan mengenai pengembangan teori. Serta dapat memberikan tambahan wawasan, pengetahuan mengenai laporan keuangan dari tinjauan PSAK No. 45 dibidang pelayanan kesehatan

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak rumah sakit agar dapat memberikan masukan yang berguna tujuannya bisa meningkatkan mutu laporan keuangan Rumah Sakit Wijaya Kusuma Lumajang berdasarkan tinjauan PSAK No. 45.
- b. Bagi pembaca atau peneliti selanjutnya diharapkan penelitian dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang penerapan PSAK No. 45 dalam Rumah Sakit Wijaya Kusuma Lumajang.

